



SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI PERSPEKTIF KEMISKINAN BUDAYA INDONESIA

SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY: PERSPECTIVE ON CULTURAL POVERTY IN INDONESIA

**Putri Indah Yani¹, Mohd. Apyranta Sukasa², Novita Agresia Manik³, Marturianus Laia⁴,
Rafli Edelweis Turnip⁵, Veronika Simbolon⁶, Alya Zahra Lirinza⁷, Ika purnamasari⁸**

Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Email : putri591@gmail.com¹, ryan.sukasa@gmail.com², novitaagresiamanik@gmail.com³, martulaia6@gmail.com⁴
, rafliturnip7@gmail.com⁵, simbolonveronika673@gmail.com⁶,
zahralirinzhaa@gmail.com⁷, Ikapurnamasari@unimed.ac.id⁸

Article Info

Article history :

Received : 10-10-2024

Revised : 13-10-2024

Accepted : 15-10-2024

Published : 19-10-2024

Abstract

The rapid urbanization in Indonesia is driven by population growth and limited job opportunities in rural areas. This situation presents social and economic challenges, including structural and cultural poverty. This study examines poverty from a sociological and anthropological perspective, focusing on the "culture of poverty" and the innovative solution of social entrepreneurship. Using a descriptive qualitative approach through literature review, the study finds that poverty is not merely an economic issue but is deeply rooted in social norms and inherited lifestyles. Social entrepreneurship, which combines business ventures with social missions, offers a sustainable solution to poverty alleviation by addressing both economic and cultural aspects in local communities.

Keywords: *poverty, culture of poverty, social entrepreneurship, sociology, anthropology, urbanization*

Abstrak

Tingginya laju urbanisasi di Indonesia didorong oleh pertumbuhan penduduk dan minimnya lapangan pekerjaan di desa. Kondisi ini memunculkan tantangan sosial dan ekonomi, termasuk kemiskinan struktural dan budaya yang kompleks. Penelitian ini mengkaji fenomena kemiskinan melalui perspektif sosiologi dan antropologi, dengan fokus pada "budaya kemiskinan" dan solusi inovatif berupa socialpreneurship. Berdasarkan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui studi literatur, ditemukan bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga pola hidup dan norma sosial yang diwariskan. Socialpreneurship, dengan memadukan kewirausahaan dan misi sosial, menjadi solusi potensial dalam mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan konteks budaya dan sosial lokal.

Kata Kunci: kemiskinan, budaya kemiskinan, socialpreneurship, sosiologi, antropologi, urbanisasi

PENDAHULUAN

Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan minimnya lapangan pekerjaan mendorong masyarakat desa usia produktif untuk merantau ke kota demi mencari kehidupan yang lebih baik. Fenomena urbanisasi ini membawa tantangan baru, seperti kesulitan mendapatkan pemukiman yang layak. Dampaknya, mobilisasi penduduk dari desa ke kota semakin meningkatkan persaingan kerja dan gesekan sosial antara pendatang dan warga asli. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah



Indonesia berkomitmen untuk menyejahterakan rakyat, seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program pengentasan kemiskinan, namun hasilnya masih belum memuaskan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,01 juta jiwa atau 10,86 persen dari total populasi. Namun, para ilmuwan mempertanyakan keakuratan pengukuran kemiskinan ini, mengingat keragaman budaya dan nilai yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. (Wardaya & Suprapti, 2018). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2019, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,79 juta orang, dengan persentase sebesar 9,22% dari total populasi. Di daerah perkotaan, tercatat ada 9,86 juta penduduk miskin, sedangkan di pedesaan jumlahnya lebih tinggi, yaitu 14,93 juta jiwa (BPS, 2019). Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di pedesaan lebih besar dibandingkan di perkotaan. (Mahdiyah, 2023)

Kemiskinan merupakan isu besar yang dihadapi Indonesia dan berbagai negara berkembang lainnya. Salah satu faktor utama kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam menjalani hidup sesuai dengan norma sosial yang dianggap bermartabat. Ini menegaskan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan isu sosial dan budaya. (Nailus Sakinah et al., 2023)

Pengentasan kemiskinan menjadi ukuran utama dalam menentukan sektor-sektor prioritas pembangunan, di mana keberhasilan menurunkan jumlah penduduk miskin sangat menentukan efektivitas kebijakan pembangunan (Zaid & Aufa, 2022). Di tengah upaya ini, konsep kewirausahaan sosial atau *socialpreneurship* muncul sebagai solusi inovatif. Kewirausahaan sosial menggabungkan tanggung jawab sosial dengan inovasi bisnis untuk mengatasi masalah sosial (Yusriadi et al., 2020). Peran *socialpreneurs* sangat penting dalam menciptakan peluang usaha, terutama di daerah pedesaan, yang dapat mendukung ekonomi lokal dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Mereka tidak hanya menawarkan solusi ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga berupaya mengatasi masalah sosial yang kompleks (Hani Putri Febriyanti et al., 2022). Dari sudut pandang sosial dan antropologis, kemiskinan tidak hanya soal kekurangan materi, tetapi juga ketimpangan dalam struktur sosial dan norma budaya. Masyarakat miskin sering terperangkap dalam stigma sosial dan mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan pengentasan kemiskinan harus bersifat holistik, dengan mengintegrasikan pemahaman sosiologis dan antropologis terkait kompleksitas masalah ini. *Socialpreneurs* bertindak sebagai agen perubahan yang memahami dinamika sosial dan budaya di balik kemiskinan. Mereka tidak hanya berfokus pada solusi finansial, tetapi juga berusaha mendorong perubahan sosial yang positif. Mereka membantu masyarakat miskin mengatasi stigma sosial dan membangun solidaritas, serta menyediakan peluang bagi individu dan komunitas untuk memperbaiki kondisi mereka sendiri, dengan fokus pada pendidikan, kesejahteraan sosial, dan layanan kesehatan. (Yusriadi et al., 2020)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur untuk menganalisis sumber-sumber pustaka yang relevan mengenai kemiskinan budaya di Indonesia dalam perspektif sosiologi dan antropologi. Metode ini melibatkan pengumpulan data



sekunder dari buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen lain yang membahas berbagai aspek kemiskinan budaya dalam konteks masyarakat Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebudayaan kemiskinan adalah cara hidup masyarakat miskin yang diadopsi untuk memenuhi kebutuhan, beradaptasi, dan merespons posisi mereka sebagai kelompok marginal. Menurut Ancok (1995), budaya kemiskinan menjadi desain kehidupan bagi orang miskin, diwariskan antar generasi, dan berlanjut sebagai solusi terhadap masalah hidup. Oscar Lewis (1988) menjelaskan bahwa masyarakat miskin menunjukkan pola perilaku dan sikap tertentu yang menjadi landasan hidup mereka. Suparlan (1984) menambahkan bahwa budaya kemiskinan mendorong sikap pasrah dan bergantung pada bantuan. Pengemis atau gelandangan sebagai bagian dari budaya ini hidup dalam kondisi yang marginal dan tidak terintegrasi dengan masyarakat. Rendahnya pendidikan, keterampilan, harga diri, serta kesehatan juga menjadi faktor penghambat keluar dari kemiskinan. Pemerintah berperan dalam mengatasi kemiskinan, tetapi kadang menciptakan ketergantungan pada bantuan sosial, seperti yang terjadi selama krisis 1997-1999. (Mahdiyah, 2023)

1. Analisis Sosial Fenomena Kemiskinan Perspektif Sosiologi

Kemiskinan telah lama menjadi topik perdebatan, di mana berbagai definisi muncul. Levitan (1980) menyebut kemiskinan sebagai kekurangan barang dan layanan yang dibutuhkan untuk hidup layak. Schiller (1979) menambahkan bahwa kemiskinan juga mencakup ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sosial dasar. Emil Salim mendefinisikannya sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dalam sosiologi, kemiskinan dilihat lebih luas, tidak hanya sekedar kurangnya pendapatan, tetapi juga mencakup rendahnya peluang individu untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Friedman (1979) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakseimbangan dalam mengakses sumber daya sosial, seperti modal produktif, sumber keuangan, organisasi sosial, jaringan sosial, dan informasi yang mendukung peningkatan kualitas hidup. Kemiskinan dapat dibagi menjadi dua jenis: kemiskinan alamiah, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya atau teknologi, dan kemiskinan buatan, yang disebabkan oleh struktur sosial yang tidak merata. Kemiskinan buatan sering disebut sebagai kemiskinan struktural, yang menurut Selo Soemardjan (1980), terjadi karena struktur sosial membatasi akses masyarakat miskin terhadap sumber daya ekonomi, menciptakan ketergantungan pada kelompok yang lebih kaya. Golongan miskin, seperti petani tanpa lahan atau pekerja sektor informal, sulit melakukan mobilitas sosial vertikal. Chambers (1987) menggambarkan kemiskinan melalui "perangkap kemiskinan" yang terdiri dari lima elemen: kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Kerentanan, seperti ketidakmampuan menghadapi krisis, sering menyebabkan keluarga miskin terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit diatasi. Naiknya seseorang di atas garis kemiskinan tidak menjamin kebebasan dari kemiskinan, karena mereka rentan kembali ke status miskin ketika menghadapi krisis. (Mandjarreki, 2021)

a. Ciri Dari Penduduk Atau Keluarga Miskin

Keluarga miskin umumnya ditandai oleh keterbatasan pendapatan, modal usaha, dan akses terhadap kebutuhan dasar. Beberapa ciri umum keluarga miskin adalah: 1) Hidup di bawah garis kemiskinan dengan minimnya faktor produksi seperti tanah, modal, atau



keterampilan. 2) Tidak mampu memperoleh aset produksi karena pendapatan yang terbatas dan akses perbankan yang sulit, sehingga bergantung pada lintah darat. 3) Rendahnya tingkat pendidikan, bahkan ada yang tidak pernah mengikuti pendidikan formal. 4) Tinggal di pedesaan tanpa lahan atau hanya memiliki lahan kecil, seringkali bekerja sebagai buruh tani atau di sektor informal dengan pendapatan yang tidak stabil. 5) Angkatan kerja produktif, tetapi kurang keterampilan dan pendidikan yang memadai. Kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensional. Menurut John Friedmann, ada dua aspek kemiskinan: aspek primer (kurangnya aset, organisasi sosial-politik, dan keterampilan) dan aspek sekunder (kurangnya jaringan sosial, sumber keuangan, dan informasi). Terdapat sepuluh dimensi kemiskinan, seperti kekuasaan, harta, kesehatan, pendidikan, keterampilan, keadilan, afeksi, keamanan, dan kebebasan. Keterkaitan antar dimensi ini menciptakan "spiral kemiskinan" di mana kemunduran satu aspek mempengaruhi aspek lainnya. Untuk mengatasi kemiskinan, berbagai aspek tersebut harus ditangani secara serentak agar tercipta perbaikan yang berkelanjutan. (Mandjarreki, 2021)

b. Penanggulangan Kemiskinan : Refleksi Sosiologis

Pada masa lalu, penanggulangan kemiskinan di Indonesia berlandaskan pada GBHN dalam paradigma pembangunan terdahulu dan Proopenas dalam paradigma baru. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan upaya pengentasan kemiskinan selalu menjadi isu sentral dan strategis. Berbagai program pemberdayaan masyarakat miskin telah disusun untuk mengurangi populasi miskin secara konsisten. Namun, banyak program tersebut tidak berjalan dengan baik dan sering gagal karena beberapa faktor. Pertama, program yang diterapkan seringkali tidak menyentuh akar permasalahan dan tidak berdasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat miskin. Kedua, kemiskinan sering dipandang sebagai masalah budaya, seperti lemahnya etos kerja atau mentalitas, padahal kemiskinan lebih disebabkan oleh faktor struktural. Ketiga, pemilihan kelompok sasaran program seringkali bias, dan kurangnya kontrol dari masyarakat miskin sebagai subjek program tersebut. Keempat, kurangnya koordinasi dalam manajemen program dan belum adanya sistem pengelolaan yang terorganisir dengan baik. Penanggulangan kemiskinan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan dasar seperti konsumsi, tetapi juga memberikan akses yang adil terhadap kesehatan, pendidikan, dan partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. (Mandjarreki, 2021).

c. Efektivitas Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan

Untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan analisis sosial kritis yang dapat mendekonstruksi struktur sosial yang memperkuat kemiskinan. Analisis sosial harus mampu mengidentifikasi hambatan yang menghalangi upaya pemberdayaan masyarakat miskin. Salah satu metode yang digunakan dalam analisis ini adalah SWOT Analysis, yang bertujuan untuk memberikan pandangan objektif tentang kemiskinan dengan menggunakan teori dan konsep yang nyata serta terukur. (Mandjarreki, 2021).



d. Peluang dan Ancaman

Untuk mencegah dampak krisis agar tidak semakin meluas dan memberdayakan kembali penduduk miskin, pemerintah pusat dan daerah telah mengalokasikan banyak dana serta melaksanakan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan. Beberapa langkah yang diambil termasuk menyusun peta fokus program penanggulangan kemiskinan yang lebih terkini dan rinci, serta membentuk dan memberdayakan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Hal penting lainnya adalah memastikan bahwa program-program tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat miskin. Saat ini, pemerintah mengembangkan dua strategi utama untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. Pertama, meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas, di mana masyarakat miskin yang memiliki kemampuan diberikan peluang dan perlindungan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam berbagai bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kedua, mengurangi pengeluaran masyarakat miskin dengan mengurangi beban kebutuhan dasar, seperti akses ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mendukung aktivitas sosial-ekonomi. (Mandjarreki, 2021)

2. Konsep Kemiskinan Kultural

Oscar Lewis memperkenalkan konsep kemiskinan kultural, yang menyatakan bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi atau struktural, tetapi juga karena nilai-nilai dan budaya yang dianut oleh kaum miskin itu sendiri (Effendi, 1992). Menurut Lewis, kemiskinan adalah bagian dari cara hidup yang diwariskan dalam keluarga sebagai unit sosial terkecil. Budaya kemiskinan muncul sebagai adaptasi masyarakat terhadap posisi marginal mereka dalam masyarakat yang kapitalistik dan individualistik, dan ini diwariskan dari generasi ke generasi (Ancok, 1995). Portes menambahkan bahwa budaya kemiskinan membuat masyarakat terjebak dalam sikap apatis, fatalisme, dan kecenderungan untuk fokus pada kepuasan jangka pendek. Lewis melihat pola perilaku dan nilai yang umum di kalangan orang miskin sebagai sub-budaya yang merupakan variasi dari budaya nasional, dengan ciri-ciri seperti tidak adanya masa kanak-kanak yang terlindungi, perkawinan berdasarkan konsensus, dan dominasi perempuan dalam keluarga (Palikhah et al., 2016).

a. Kritik Terhadap Budaya Kemiskinan

Konsep budaya kemiskinan Oscar Lewis banyak dikritik karena dianggap terlalu fokus pada budaya orang miskin sebagai penyebab kemiskinan, tanpa memperhatikan faktor ekonomi dan politik. Lewis berpendapat bahwa budaya kemiskinan diwariskan antar generasi dan membentuk pola hidup masyarakat miskin, tetapi para kritikus seperti Gans, Baker, dan Valentine menolak pandangan ini. Gans menyatakan bahwa kemiskinan lebih kompleks, merupakan hasil interaksi antara faktor budaya dan tekanan struktural, serta menyebut bahwa orang miskin itu heterogen, tidak semua memiliki karakteristik yang sama. Valentine dan Kleiden berpendapat bahwa ciri-ciri subkultur orang miskin timbul dari situasi yang menekan, bukan dari budaya yang diwariskan. Mereka menekankan bahwa jika tekanan sosial hilang, perilaku dan nilai-nilai yang terkait dengan kemiskinan juga akan berubah. Baker mengkritik konsep ini sebagai bias dan menegaskan bahwa banyak orang miskin bekerja keras dan memiliki aspirasi, namun terhambat oleh sistem ekonomi yang tidak mendukung. Budaya



kemiskinan, menurut Lewis, mencakup nilai-nilai seperti apatis, fatalisme, dan ketergantungan, serta pola hubungan keluarga yang cenderung didominasi oleh perempuan. Orang-orang yang menganut budaya ini cenderung kurang terintegrasi dengan institusi sosial yang lebih luas dan terjebak dalam siklus kemiskinan. Para pengkritik berpendapat bahwa kondisi ini lebih disebabkan oleh struktur sosial dan ekonomi yang menindas, bukan karena budaya itu sendiri. (Palikhah et al., 2016)

b. Bentuk Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural mengacu pada kondisi kemiskinan yang dipengaruhi oleh budaya, nilai-nilai, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang memperkuat siklus kemiskinan dalam masyarakat. Konsep ini dikembangkan oleh Oscar Lewis dalam studi-studinya tentang keluarga miskin di Meksiko, yang menunjukkan bahwa orang miskin memiliki pola hidup dan sikap tertentu sebagai cara untuk bertahan hidup. Pola ini kemudian menjadi dasar bagi terciptanya *budaya kemiskinan* yang melekat pada kelompok masyarakat tersebut. Menurut Lewis, masyarakat yang hidup dalam kemiskinan kultural menunjukkan ciri-ciri tertentu, seperti kurangnya masa kanak-kanak yang normal karena anak-anak dipaksa bekerja sejak dini untuk membantu perekonomian keluarga. Selain itu, pada tingkat keluarga, kegiatan sehari-hari sering kali tidak terstruktur dan lebih berdasarkan dorongan atau kebutuhan mendesak. Sering kali, peran perempuan dalam keluarga menjadi lebih dominan karena laki-laki cenderung terlibat dalam kekerasan atau perilaku impulsif. Dalam konteks sosial, individu yang hidup dalam budaya kemiskinan biasanya memiliki kemampuan integrasi sosial yang rendah, hubungan sosial yang penuh kecurigaan, dan kesulitan untuk menerima kekecewaan. Secara mental, ciri-ciri yang umum termasuk kemampuan bahasa yang tertunda, kesulitan menunda kepuasan, dan ketidakmampuan berpikir konseptual. (Palikhah et al., 2016)

c. Penyebab Kemiskinan Kultural

Penyebab kemiskinan kultural, seperti yang dijelaskan dalam beberapa studi, tidak hanya terletak pada faktor ekonomi semata, tetapi juga disebabkan oleh nilai-nilai dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya, nelayan di Indonesia sering kali dikenal dengan gaya hidup yang berfoya-foya setelah melaut, yang membuat mereka terjebak utang dan memperkuat siklus kemiskinan. Dalam konteks petani Jawa, pandangan hidup yang menekankan pada kepuasan batin dan ketenangan juga dianggap menjadi salah satu faktor yang membuat mereka tidak termotivasi untuk meningkatkan taraf hidup mereka secara ekonomi. Meskipun budaya kemiskinan dapat dilihat sebagai cara beradaptasi dengan kondisi yang sulit, ia juga menjadi penghalang bagi perubahan dan kemajuan. Kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun ini membuat individu atau kelompok masyarakat merasa sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan, dan akhirnya memperkuat siklus kemiskinan tersebut dari generasi ke generasi. (Palikhah et al., 2016)

d. Dampak Kemiskinan Kultural

Konsep kemiskinan kultural mengacu pada gagasan bahwa kemiskinan diwariskan dari generasi ke generasi melalui lingkungan dan pola pikir yang ada dalam masyarakat miskin. Orang-orang miskin tumbuh dengan pendidikan minim, nutrisi yang buruk, dan keyakinan bahwa kemiskinan adalah takdir yang tak terhindarkan. Hal ini menumbuhkan



sikap permisif terhadap pelanggaran aturan, kekerasan, dan kriminalitas. Kemiskinan dianggap sebagai faktor pembenaran bagi tindakan kriminal karena mereka merasa terdesak untuk bertahan hidup sehari-hari tanpa memikirkan konsekuensinya. Budaya kemiskinan ini juga menghasilkan pola perilaku seperti kekerasan yang dianggap sah dan normal di kalangan miskin. Masyarakat secara tidak sadar sering kali memaklumi perilaku ini dengan anggapan bahwa mereka melakukannya karena kemiskinan. Fenomena seperti ini memperkuat siklus kemiskinan dan perilaku kekerasan. Geertz memperkenalkan konsep "kemiskinan bersama" yang menggambarkan bahwa dalam komunitas miskin, pendapatan rendah dibagi rata di antara semua anggota, menghasilkan stagnasi ekonomi. Selain itu, ada kecemburuan sosial karena ketidaksetaraan, di mana masyarakat miskin merasa bahwa orang kaya telah mengambil lebih banyak dari sumber daya yang terbatas, sehingga memperparah jurang sosial. Akhirnya, lingkungan hidup yang buruk seperti tempat tinggal yang sempit dan tidak sehat meningkatkan ketegangan dan memicu kekerasan. Kekerasan sering kali menjadi bentuk pelampiasan frustrasi karena ketidakmampuan mengatasi masalah hidup yang berat. (Palikhah et al., 2016)

3. Peran Socialpreneur dalam Transformasi Sosial dan Pengentasan Kemiskinan Perspektif Sosiologi Dan Antropologi

Socialpreneurship merupakan perpaduan antara kewirausahaan dan orientasi sosial yang bertujuan menciptakan solusi untuk masalah sosial, budaya, dan lingkungan. Konsep ini berkembang pesat di kalangan generasi milenial, yang melihatnya sebagai cara untuk menjalankan bisnis sekaligus memberi dampak positif pada komunitas sekitar (Kurniawan & Parella Krisma Abdi, 2018). Socialpreneur fokus tidak hanya pada keuntungan, tetapi juga pada penciptaan dampak sosial dan kelestarian lingkungan.

Konsep dan Karakteristik Socialpreneurship

Socialpreneurship mengedepankan tiga pilar utama:

1. Sosial (People): Memberikan solusi atas masalah masyarakat.
2. Ekonomi (Profit): Mencapai ketahanan finansial jangka panjang.
3. Lingkungan (Earth): Memastikan keseimbangan ekologi

Selain itu, aspek inovasi berperan penting dalam kewirausahaan sosial. Bisnis ini menekankan penciptaan nilai sosial dan integrasi antara sektor nirlaba dan komersial untuk keberlanjutan jangka panjang. (Nailus Sakinah et al., 2023)

Perspektif Sosiologi dan Antropologi dalam Socialpreneurship

1. Sosiologi: Mempelajari bagaimana stigma sosial terhadap kemiskinan memengaruhi akses ke sumber daya ekonomi dan membentuk pola interaksi masyarakat.
2. Antropologi: Menganalisis pengaruh budaya dan nilai lokal terhadap strategi kewirausahaan, termasuk adaptasi bisnis dan program sosial agar sesuai dengan tradisi setempat (Fadli Daud Abdullah et al., 2023)



KESIMPULAN

Kemiskinan budaya di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Urbanisasi dan migrasi dari desa ke kota menciptakan tekanan ekonomi baru dan memperburuk kesenjangan sosial, terutama di daerah perkotaan. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program pengentasan kemiskinan, hasilnya belum optimal karena masalah ini tidak hanya terkait dengan ekonomi tetapi juga norma budaya dan struktur sosial yang tidak adil. Dari perspektif sosiologi dan antropologi, kemiskinan bukan hanya kekurangan materi, tetapi juga terkait dengan stigma sosial, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta keterasingan sosial. Budaya kemiskinan, seperti yang dijelaskan Oscar Lewis, menekankan bahwa pola hidup dan nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi membuat masyarakat miskin terjebak dalam siklus kemiskinan. Konsep ini mendapat kritik karena mengabaikan faktor struktural dan ekonomi yang memperkuat kemiskinan.

Selain itu, socialpreneurship muncul sebagai solusi inovatif yang menggabungkan kewirausahaan dengan tanggung jawab sosial. Socialpreneurs berperan penting dalam membuka peluang ekonomi di komunitas miskin dan membantu mengatasi stigma sosial melalui pendidikan dan pemberdayaan. Mereka menciptakan solusi berkelanjutan yang berfokus pada pengurangan kesenjangan sosial dan pemberian akses yang lebih luas terhadap layanan dasar.

Secara keseluruhan, upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia memerlukan pendekatan holistik, dengan memperhatikan keterkaitan antara faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Kebijakan yang efektif harus mampu mengatasi masalah kemiskinan struktural dan budaya sekaligus. Peran socialpreneurs sangat krusial dalam menciptakan perubahan sosial yang positif, membantu masyarakat miskin keluar dari siklus kemiskinan, dan mendorong kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadli Daud Abdullah, Arifin, T., & Abdal. (2023). Analysis of Sociology and Anthropology of Sharia Economic Law On Murabahah Dispute Settlement at The Cirebon Religious Court. *Strata Law Review*, 1(2), 118–127. <https://doi.org/10.59631/slr.v1i2.94>
- Hani Putri Febriyanti, Triayu Nur Afifah, Nurul Aini, & Marina Ery Setiyawati. (2022). Socialpreneur Sebagai Strategi Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Layanan Lembaga Keuangan Mikro: Literature Review. *Akuntansi*, 1(4), 261–275. <https://doi.org/10.55606/jurnalrisetilmuakuntansi.v1i4.129>
- Kurniawan, F., & Abdi, P. K. (2018). Sociopreneurship Masyarakat Gusuran Dalam Membangun Konsep Kampung Wisata Tematik Topeng Malangan Sociopreneurship of Social Community in Topeng Malangan Community Based Tourism. *Jurnal Sosiologi Sociopreneurship Masyarakat Gusuran*, 2(2), 35–48.
- Mahdiyah, N. (2023). STUDI LITERATUR KEBUDAYAAN KEMISKINAN PADA PENGEMIS DI PERKOTAAN. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 46–54. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>
- Mandjarreki, S. (2021). ANALISIS SOSIAL FENOMENA KEMISKINAN. *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 4(1), 75–95.
- Nailus Sakinah, N. S., Arifin, T., & Abdal, A. (2023). Peran Sociopreneur dalam Transformasi Sosial dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Lembaga Keuangan Mikro Perspektif Sosiologi



- dan Antropologi. *Strata Social and Humanities Studies*, 1(2), 117–126. <https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.105>
- Palikhah, N., Dakwah, F., Komunikasi, D., & Antasari, I. (2016). Konsep Kemiskinan Kultural. In *Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah* (Vol. 15).
- Wardaya, S., & Suprapti, A. (2018). Kemiskinan dalam Perspektif Sosiologi. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 2(1), 71–82. <https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.1.3121>
- Yusriadi, Y., Tahir, S. Z. bin, Awaluddin, M., & Misnawati, M. (2020). Pengentasan Kemiskinan melalui Socialpreneur. *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 115–120. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v4i2.2529>
- Zaid, Z., & Aufa, M. F. (2022). Peran Undang-Undang Persaingan Usaha dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 15(1), 89–99. <https://doi.org/10.21107/pamator.v15i1.14282>